



Data untuk Pembangunan: Kolaborasi Menuju Indonesia yang Inklusif

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas data dan ketepatan sasaran program bantuan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

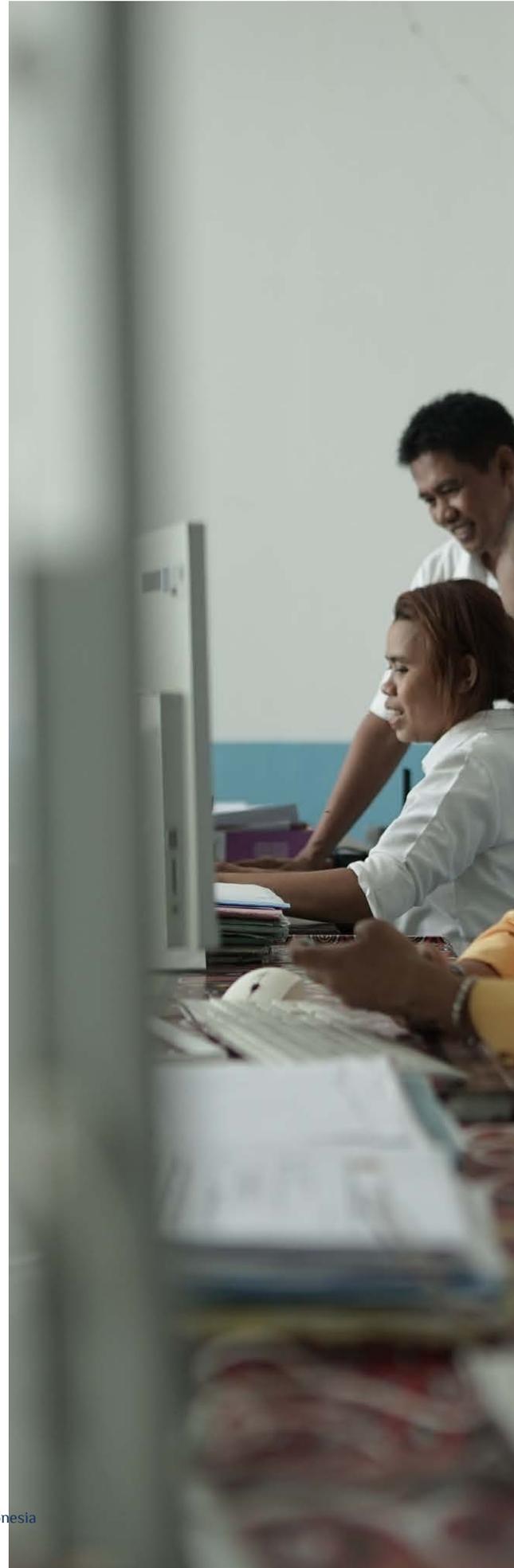
Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa tiga data utama terkait kemiskinan terintegrasi dan tervalidasi hingga tingkat masyarakat. Melalui langkah ini, bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan menciptakan perluasan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Praktik Kolaborasi Pemadanan Data dalam Mendukung Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Problema kemiskinan selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena berdampak langsung pada jutaan penduduk dan berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial. Hingga saat ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan terus menjadi salah satu prioritas Pemerintah Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tentu kesuksesan program tersebut amat bergantung pada ketersediaan dan akurasi data kemiskinan untuk mengidentifikasi dan mendukung kelompok rentan secara efektif.

Upaya pemadanan data di Provinsi NTT telah menumbuhkan kepercayaan antara Pemerintah pusat yang mengelola data, dan Pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pemanfaatan serta pemutakhiran/validasi data secara langsung. Keterlibatan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam proses validasi data memperluas kolaborasi hingga tingkat desa. Penggunaan data yang sama untuk penargetan program di berbagai tingkatan, provinsi, kabupaten, dan desa, telah menghasilkan pelaksanaan program yang efisien.

Data sosial-ekonomi yang terintegrasi merupakan perangkat yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan mengintegrasikan beberapa basis data, pemerintah dapat memastikan bahwa program bantuan menysasar kelompok yang paling membutuhkan, mengurangi duplikasi, dan memaksimalkan dampak dari sumber daya yang terbatas. Data yang terintegrasi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas yang penting untuk penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.



Kompleksitas dan Tantangan dalam Mengelola Data Kemiskinan

Dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan kondisi sosial-ekonomi yang beragam, pengelolaan data kemiskinan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengandalkan tiga basis data kemiskinan utama, yaitu DTKS, P3KE, dan Regsosek. Masing-masing basis data memiliki tujuan yang berbeda, namun semuanya berkontribusi dalam mendukung pada upaya penanggulangan kemiskinan.

DTKS digunakan untuk penyaluran bantuan sosial secara umum dan mendukung perencanaan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, P3KE difokuskan pada penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga atau individu yang berada dalam kondisi paling rentan dan membutuhkan intervensi yang lebih mendalam. Regsosek, di sisi lain, menyediakan pencatatan terpadu untuk mengintegrasikan data sosial-ekonomi dari berbagai sektor, sehingga memungkinkan perencanaan dan pemantauan yang komprehensif. Meskipun masing-masing kumpulan data memiliki tujuan tersendiri, penggunaan yang terpisah dapat mengakibatkan fragmentasi dan inefisiensi, seperti duplikasi bantuan dan penargetan penerima manfaat yang tidak tepat sasaran.

Pemadanan DTKS, P3KE, dan Regsosek berpotensi mengatasi tantangan yang dihadapi dengan menciptakan ekosistem data yang kohesif. Namun, pelaksanaan proses ini tidak tanpa hambatan, antara lain:

- Fragmentasi kumpulan data yang ada menyebabkan duplikasi dan inkonsistensi.
- Memastikan akurasi data memerlukan upaya validasi yang ekstensif, yang tentunya membutuhkan sumber daya.
- Ketidakakuratan data sebelumnya mengikis kepercayaan, sehingga memerlukan upaya baru untuk membangun kepercayaan pada sistem.
- Meskipun menghadapi tantangan ini, proses integrasi telah memberikan manfaat signifikan, seperti yang terlihat pada upaya di Provinsi NTT.



Dapur Warga Lansia di Desa Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Foto: SKALA)

Hal Penting dari Upaya Kolaborasi Pengelolaan Data di NTT

Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menjadi contoh praktik baik dalam kolaborasi pengelolaan data, terutama melalui pepadanan data. Pemerintah pusat, khususnya Bappenas, bersama dengan Pemerintah Provinsi NTT yang didukung oleh Program SKALA, berhasil memadankan tiga kumpulan data utama guna meningkatkan kapasitas dalam menangani masalah kemiskinan dan stunting dengan:

- 1. Revitalisasi Manajemen Data:** Pemerintah NTT meningkatkan kemampuan pengelolaan data untuk memastikan data yang akurat dan terkini. Ini mencakup menyusun prosedur operasi standar sebagai pedoman teknis dan rencana aksi dalam kerangka kebijakan Satu Data.
- 2. Memanfaatkan SEPAKAT:** Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT) digunakan untuk menganalisis data, termasuk data mikro sosial-ekonomi. Analisis ini memberikan informasi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait layanan dasar dan perumusan rencana aksi selama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- 3. Mengintegrasikan Data Kemiskinan:** Data dari DTKS, P3KE, OPD, dan Regsosek berhasil dipadankan untuk program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran di beberapa kabupaten, seperti Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Manggarai Timur.
- 4. Mendukung Program yang Ditargetkan:** Data terintegrasi digunakan untuk melaksanakan program-program seperti pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, yang didanai oleh Dana Insentif Fiskal (DIF). Upaya ini memberikan manfaat kepada 24.560 keluarga dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan 9.270 individu dalam upaya pencegahan stunting.

Upaya proaktif Pemerintah Provinsi NTT, yang didukung oleh Pemerintah pusat, menunjukkan bagaimana sistem data terintegrasi di tingkat daerah dapat mengubah program bantuan sosial menjadi lebih inklusif dan berdampak.



Mengubah Kehidupan Masyarakat Melalui Kolaborasi dalam Peadanan dan Verifikasi Data

Para penerima manfaat program bantuan sosial di Provinsi NTT sangat mengapresiasi perubahan positif yang terjadi berkat upaya peadanan data oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Juliana Oematan (41), seorang perempuan kepala keluarga dari Desa Nauno di Kecamatan Fatuleu, mengaku bahwa bantuan sosial dari pemerintah sangat meringankan hidupnya sehari-hari. Sejak suaminya meninggal pada September 2024, ia harus berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari lima orang anak.

“Saya senang dapat beras, gula, dan minyak yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” katanya.

Dengan data yang lebih akurat, Juliana dan keluarganya kini telah masuk ke dalam daftar penerima manfaat bansos, yang memastikan hak mereka untuk menerima bantuan yang sangat dibutuhkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Esther Regina Neno Baes (44), perempuan kepala keluarga lainnya yang tinggal di desa yang sama dengan Juliana. Menurutnya, program bantuan sosial sangat meringankan bebannya dalam menghidupi 5 orang anak. Setelah sang suami meninggal, ia menerima bantuan berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

“Saya diminta mengurus KK dulu supaya bisa mendapat bantuan setelah suami meninggal. Setelah itu, saya mendapatkan bantuan sembako, dan baru-baru ini dapat ayam dan telur juga,” ucap Esther.

Dengan dukungan strategis dari Program SKALA untuk mengintegrasikan berbagai basis data, Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT telah mencapai beberapa hal berikut ini:

1. Meningkatkan efisiensi, menghilangkan duplikasi data, dan memastikan penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif.
2. Memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
3. Meningkatkan tingkat kepercayaan dengan melalui proses akuntabel dan transparan, serta,
4. Mengurangi konflik yang timbul akibat bantuan tidak tepat sasaran.
5. Kolaborasi untuk peadanan data sosial-ekonomi, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), telah mendorong pengembangan kebijakan dan sistem pemantauan yang lebih tepat, sehingga mampu mengubah upaya penanggulangan kemiskinan di seluruh Provinsi NTT.



Ibu Esther Regina Neno Baes, 44 tahun
Desa Nauno, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Foto: SKALA)

Memperkuat Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kolaborasi Pemadanan Data

Sistem data terintegrasi memberikan dampak positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pemadanan kumpulan data, seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek memastikan bahwa program bantuan sosial dapat terlaksana dengan lebih terarah, efisien, dan transparan. Pencapaian Pemerintah Provinsi NTT, yang didukung oleh Pemerintah pusat dan bantuan teknis Program SKALA, menggambarkan potensi transformatif dari sistem ini.

Proses tahapan padupadan Data Regsosek, P3KE, DTKS menumbuhkan konsolidasi data dan kebijakan yang pada akhirnya mendorong ketepatan sasaran program, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang merupakan konsolidasi ketiga data sosial ekonomi tersebut secara nasional, akan memperkuat perlindungan sosial dan penyediaan layanan dasar yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. DTSEN merupakan sebuah terobosan yang perlu didukung semua pihak agar konsolidasi data makin bermanfaat untuk mendukung kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang sinergis dan kolaboratif baik di Pusat, Provinsi, Kab/Kota hingga ke Desa.

Dengan mengatasi tantangan dan membangun keberhasilan seperti yang dicapai oleh Provinsi NTT, Indonesia dapat terus menyempurnakan praktik pengelolaan datanya, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju pembangunan yang inklusif dan keadilan sosial.